

KAJIAN PENGELOLAAN GURU SD DAN SMP NEGERI DI KOTA SAMARINDA

STUDY ON MANAGEMENT OF STATE ELEMENTARY AND JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHERS IN THE CITY OF SAMARINDA

Iya' Setyasih¹, Yusak Hudiyono¹, Isfihani², Armelya Trinita F², Yaskinul Anwar¹

¹Universitas Mulawarman

Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda 75119 Kalimantan Timur

Email: iyasetyssih@gmail.com

²Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Jl. Kesuma Bangsa Kota Samarinda Kalimantan Timur

Diterima: 13 Juli 2021; Direvisi: 19 Juli 2021; Disetujui: 30 Juli 2021

ABSTRACT

Factors that influence education development efforts in Indonesia include the availability of adequate teachers, both in quantity and quality. For this reason, it is necessary to conduct a study related to the management of public teachers in elementary and junior high schools in Samarinda City which aims to find out how to solve the main problems. This research method is mixed methods and evaluative with unit analysis of elementary and junior high school education units in Samarinda City. Research data were collected through semi-structured interviews, FGDs and questionnaires to find out teacher data. Based on the results of the study, it was shown that the number of PNS teachers at the State Elementary and Junior High Schools in Samarinda City was still not sufficient and quite a number of them were certified, meaning that in terms of teacher competence, they were appropriate. The projection results show that for the next 2 years the need for the number of PNS teachers at public elementary and junior high schools in Samarinda City will increase. For this reason, it is necessary to appoint elementary and junior high school teachers in the Samarinda City area with a composition according to the needs of elementary and junior high school teachers, especially teachers who are still non-civil servants and equal distribution of teachers. In addition, providing opportunities for teachers who have not been certified educators to participate in PPG in positions financed by the Samarinda City government and conducting periodic monitoring of teacher competence.

Keywords: Management, State Teacher, Elementary, Middle School

ABSTRAK

Faktor yang berpengaruh terhadap upaya pembangunan pendidikan di Indonesia antara lain tersedianya guru yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas. Untuk itu perlu dilakukan kajian terkait pengelolaan guru negeri pada SD dan SMP di Kota Samarinda yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemecahan pokok-pokok permasalahannya. Metode penelitian ini adalah mixed methods dan evaluatif dengan unit analisis satuan pendidikan SD dan SMP Negeri yang ada di Kota Samarinda. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, FGD dan kuesioner untuk mengetahui data guru. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah guru PNS pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda masih belum mencukupi kebutuhan dan sudah cukup banyak yang tersertifikasi, artinya dari segi kompetensi guru sudah sesuai. Hasil proyeksi menunjukkan jika sampai 2 tahun ke depan kebutuhan akan jumlah guru PNS pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda meningkat. Untuk itu perlu pengangkatan guru SD dan SMP di wilayah Kota Samarinda dengan komposisi jumlah sesuai kebutuhan guru SD dan SMP, terutama guru yang masih non PNS dan pemerataan guru. Selain itu, memberikan peluang bagi guru yang belum bersertifikat pendidik untuk mengikuti PPG dalam jabatan dibiayai oleh pemerintah Kota Samarinda dan mengadakan pemantauan kompetensi guru secara periodik.

Kata Kunci: Pengelolaan, Guru Negeri, SD, SMP

PENDAHULUAN

Pengelolaan terkait guru saat ini diperlukan, mengingat pemerataan guru sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan belum sesuai harapan. Pendidikan meliputi banyak faktor yang berpengaruh, antara lain sarana dan prasarana, kurikulum, siswa dan yang utama yaitu guru. Pendidikan terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan, sehingga agar berjalan dengan baik perlu pengelolaan secara benar (Rosemarie, 2009). Ketersediaan guru, baik dari segi jumlah maupun kualitas adalah salah satu faktor utama dalam pembangunan Pendidikan di Indonesia. Namun, penyediaan guru saat ini masih menemui banyak permasalahan, terutama di daerah seperti belum terpenuhinya standar minimal kualitas profesional guru.

Pemenuhan jumlah kebutuhan guru tidak dapat lepas dari jumlah murid, kurikulum, keadaan guru, kebijakan baru dan sebagainya (Sunandar, 2006). Jumlah pertumbuhan penduduk dan murid diwaktu mendatang merupakan faktor penentu perhitungan jumlah kebutuhan guru. Untuk itu perlu dilakukan analisis secara benar dan tidak asal-asalan terkait kebutuhan guru tersebut. Identifikasi kebutuhan guru sesuai mata pelajaran, lokasi, kompetensi profesional harus diperhitungkan dan tidak dapat diabaikan dalam melakukan analisis kebutuhan guru. Analisis kebutuhan guru pada setiap jenjang dan jenis pendidikan memerlukan data, antara lain: 1) jumlah keseluruhan siswa, 2) jumlah rata-rata jam belajar siswa per minggu, 3) rata-rata jumlah kelas (*class size*), 4) jumlah rata-rata jam mengajar guru per minggu (Matin, 2013). Selain hasil analisis keempat data tersebut, masih memerlukan data tambahan lain untuk analisis kajian perhitungan kebutuhan guru.

Pada tahun 2001 telah diberlakukannya otonomi daerah yang merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Termasuk di dalamnya pengangkatan guru PNS yang semula merupakan kewenangan pemerintah pusat, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun hal tersebut menyebabkan semakin tidak sesuainya pemenuhan kebutuhan guru berdasarkan kualitas maupun kuantitas. Meskipun demikian, daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan guru, sebab daerah yang memahami kebutuhan guru di wilayahnya dan sistem pemberian gaji guru menggunakan dana APBD yang cukup besar.

Berdasarkan hasil analisis sementara terkait kebutuhan guru PNS pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1) jumlah rombel SD 2.330 dan guru SD yang tersedia 2967 orang, 2) jumlah rombel SMP 842 dengan jumlah guru PNS 1040 dan non PNS 301. Sesuai dengan data tersebut, jumlah guru kelas SD yang dibutuhkan adalah 2.330 dan jumlah guru agama dan penjas masing-masing 198, sehingga jumlah total guru PNS SD yang dibutuhkan adalah 2.726 dan sementara guru PNS SD adalah 1584. Sedangkan untuk guru PNS SMP idealnya adalah 1.578 dan jumlah real adalah 1.040, sehingga masih ada kekurangan jumlah guru.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah guru PNS pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda masih kurang. Sesuai dengan PP 19 Tahun 2017 tentang Perubahan PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan Standar Pengelolaan dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka perlu dilakukan kajian terkait jumlah guru PNS pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jumlah guru PNS, mengingat dalam empat tahun mendapat banyak guru yang memasuki masa pnsiun dan Indonesia menghadapi bonus demografi. Mengingat guru adalah garda terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang akan berpengaruh pada kemajuan negara.

Pemenuhan jumlah guru tersebut juga harus memperhatikan kualitas dan kompetensi sebagai seorang guru. Guru sebagai agen pembelajaran harus memiliki kualifikasi akademi dan kompetensi yang sesuai, sehat jasmani dan rohani, dan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Sappaille, 2006). Untuk itu, jumlah guru yang mengikuti Program Profesi Guru (PPG)

agar mendapatkan sertifikasi dan menjadi guru profesional juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian terkait pengelolaan guru negeri pada SD dan SMP di Kota Samarinda. Kajian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemecahan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Kecukupan jumlah guru PNS SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda; 2) Kebutuhan guru PNS SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda; 3) Banyaknya guru PNS SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda yang tidak dapat memenuhi 24 jam tata muka per minggu; 4) Distribusi guru PNS SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda; 5) Proyeksi ketersediaan dan kebutuhan guru PNS SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda berdasarkan Kurikulum 2013, lima dan sepuluh tahun ke depan; dan 6) Distribusi guru PNS SD dan SMP Negeri yang sudah tersertifikasi di Kota Samarinda.

TINJAUAN PUSTAKA

Guru sebagai pendidik berperan sebagai tokoh yang menjadi panutan bagi para murid dan lingkungannya (Danim, 2002). Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru seharusnya memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional yang mampu dan bersedia melakukan pengembangan diri untuk profesinya, mengikuti dan menjadi anggota organisasi profesi pendidikan dengan berpegang teguh kode etik profesi, berperab serta dalam mengembangkan profesinya, dan mampu melakukan kerja sama dengan profesi lain (Roestiyah NK, 2001). Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru (Usman, 2002) dan mampu melaksanakan pembelajaran dan pendidikan pada suatu situasi pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai atau orang dewasa yang sehat jasmani maupun rohani, kompeten, terampil, terbuka pada perubahan, dan memiliki sifat jujur, adil dan kasih sayang (Yusuf, 2018).

Guru yang profesional sebagai pendidik memiliki hal-hal berikut: 1) memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas keimanan dan ketaqwaan, 2) mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengikuti perkembangan IPTEK, 3) mampu belajar dan bekerjasama dengan profesi lain, 4) beretos kerja yang kuat, 5) mampu mengembangkan karir, 6) berjiwa profesional tinggi (Hasan, 2003). Berdasarkan hal tersebut, maka guru yang professional memiliki kewajiban untuk memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam perminggu dan maksimal 40 jam perminggu, sehingga diperlukan pengelolaan kebutuhan, distribusi, dan kompetensi guru yang merata.

Untuk memenuhi standar pelayanan pendidikan di sekolah, maka penyediaan jumlah guru sesuai kebutuhan merupakan hal penting agar pembelajaran dapat terjadi (Behrstock, Ellen, 2010). Hal ini untuk menjaga dan memastikan kesempatan untuk belajar semua murid sama. Sejalan dengan pendapat tersebut, pemenuhan kebutuhan guru professional mutlak dibutuhkan untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap murid di sekolah (Koswara, 2016). Belum meratanya pendistribusian guru merupakan masalah yang solusinya membutuhkan keterlibatan *stakeholders* dan memiliki tujuan yang lebih luas dalam pendidikan (Peske, Heather G.; Haycock, 2006). Lebih jauh permasalahan guru yang tidak merata antar sekolah antar wilayah menyebabkan daerah perlu membuat kebijakan terkait guru, baik untuk penempatan maupun penugasan (Behrstock, Ellen, 2010)(Sidqi et al., 2019).

Pemerataan guru sesuai bidang dan kompetensinya, tidak hanya terkait kebutuhan berdasarkan satuan pendidikan di Kota Samarinda, namun juga karena pelaksanaan Kurikulum 2013. Usaha untuk menata dan pemeratakan distribusi guru, memerlukan kebijakan dan upaya dari pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan guru sesuai dengan kebutuhan guru dalam rangka implementasi

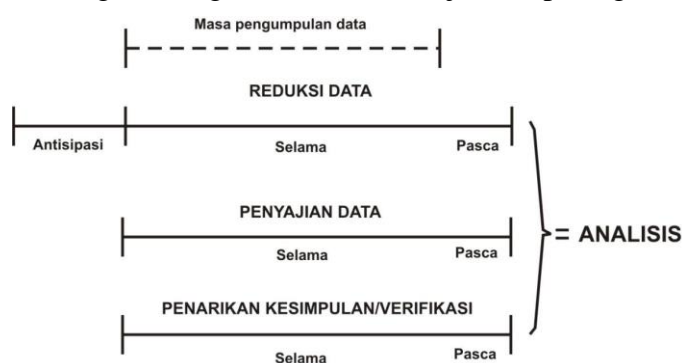
Kurikulum 2013 (Sunuyeko, Nurcholis.et al, 2016). Pegelolaan guru tersebut secara umum bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, dengan pengelolaan dan perencanaan kebutuhan guru, pemerintah daerah menentukan jumlah guru yang dibutuhkan, sehingga seimbang antara *demand* dan *supplay* (Isma, 2017).

METODE

Kajian Pengelolaan Guru Negeri (Perencanaan Kebutuhan, Ketersediaan, Distribusi, Kompetensi, dan Sertifikasi) ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) (Creswell, 2003). Pendekatan kualitatif berlaku untuk menggali kebutuhan guru, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah dalam memenuhi kebutuhan jumlah guru. Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk menghitung jumlah ketersediaan guru, sebaran guru, kompetensi dan sertifikasi. Oleh karena dalam komunitas sekolah, maka unit analisis dari penelitian ini adalah sekolah. Jadi responden penelitian adalah sekolah, yang mungkin diwakili oleh salah satu guru saat wawancara dan pengisian kuesioner. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif sebagai bagian dari penelitian terapan dipilih karena mampu memberikan arah pada kegiatan yang dilakukan. Penelitian evaluasi ini dapat dilaksanakan dengan baik jika tujuan pada program tercantum dengan jelas, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian seperti yang diharapkan sesuai dengan kerangka konseptual (Borg, W.R and Gall, 2003).

Penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu 4 bulan dimulai pada bulan September sampai bulan Desember 2020. Untuk lokasi penelitian di wilayah Kota Samarinda. Pelaksanaan penelitian ini terbagi dalam tiga tahap, yaitu 1) persiapan, 2) pengumpulan data dan survey, dan 3) analisis data. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara: 1) Wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) untuk mendapatkan data kebutuhan guru, waktu pengajuan untuk memenuhi kebutuhan guru, usaha untuk memenuhi kebutuhan guru, dan jumlah guru yang akan pensiun; 2 FGD diperlukan sebagai bentuk triangulasi dan verifikasi atas data yang diperoleh; dan 3) Kuesioner digunakan untuk mengetahui data guru. Keterbatasan waktu tampaknya menjadi hambatan bagi tim untuk melakukan wawancara dengan pihak sekolah.

Analisis data menggunakan triangulasi yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.
Komponen dalam Analisis data (*flow model*)
(Sumber: Miles & Huberman, 1992)

Berdasarkan gambar 1, setelah pengumpulan data dilakukan oleh peneliti, maka dilakukan antisipatory sebelum melakukan reduksi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Samarinda memiliki 10 kecamatan dan 59 kelurahan. Pada tahun 2020, proyeksi jumlah penduduk mencapai 886.806 jiwa (BPS, 2020) dengan luas wilayah 718 km² dan

kepadatan penduduk 1.236 jiwa/km². Terkait data kependudukan di Kota Samarinda diketahui kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Samarinda Ulu sekaligus kecamatan terpadat. Data kependudukan tersebut diperlukan sebagai bahan penentu kebijakan pengelolaan kebutuhan guru, sebab jumlah siswa berkaitan dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Namun demikian, perlu juga diperhatikan jumlah penduduk berdasarkan golongan usia untuk lebih spesifik lagi dalam menentukan kebijakan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang disebarakan terkait kebutuhan guru pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda, didapatkan data bahwa masih banyak sekolah negeri kekurangan guru. Guru yang masih kurang terutama untuk mata pelajaran Bimbingan Konseling (BK) di tingkat SMP, apa lagi sampai 2 tahun ke depan akan banyak guru yang pensiun. Untuk kebutuhan guru di tingkat SD juga belum tercukupi dengan baik. Belum tercukupinya kebutuhan guru tersebut dapat menjadi hambatan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Samarinda, karena pemenuhan kebutuhan guru merupakan bagian integral pemenuhan standar pelayanan pendidikan di sekolah (Behrstock, Ellen, 2010). Permasalahan terkait guru ini memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah Kota Samarinda, sebab distribusi guru yang tidak merata adalah masalah yang solusinya membutuhkan keterlibatan banyak *stakeholders* (Peske, Heather G.; Haycock, 2006).

Unit analisis penelitian ini adalah SD dan SMP Negeri yang ada di Kota Samarinda, sehingga data dari hasil penelitian ini dapat digeneralisasi dan sesuai dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan guru tidak hanya terkait jumlah atau kuantitas tetapi juga terkait kualitas, termasuk guru yang tersertifikasi. Dari penelitian ini diketahui jika sekolah mengangkat guru non PNS untuk memenuhi kekurangan guru, baik pada tingkat SD maupun SMP Negeri di Kota Samarinda. Berikut ini hasil penelitian ini.

1. Data Kecukupan dan Kebutuhan Guru SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda

a. SD Negeri di Kota Samarinda

Sekolah Dasar (SD) Negeri yang ada di Kota Samarinda berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sebanyak 163, dengan jumlah rombel sebanyak 2.330 dan jumlah guru 2.967 orang. Berdasarkan data pada Tabel 2. diketahui jika jumlah ruang kelas yang tersedia ada 1.694 ruang dengan jumlah rombel 2.330 dan jumlah guru 2.967 orang. Dari tabel 2 juga diketahui jika masih ada beberapa SD Negeri yang kekurangan guru, artinya pada 1 SD Negeri terdapat 6 rombel dan jumlah guru juga 6 orang. Padahal idealnya jika terdapat 6 rombel pada 1 sekolah, maka ada 6 guru kelas, 1 guru agama, dan 1 guru penjas, sehingga jumlah total guru yang diperukan pada 1 sekolah dengan 6 rombel adalah 8 guru. Jika dirata-rata maka kebutuhan guru untuk tiap 6 rombel adalah 8 orang guru, maka jumlah guru yang diperlukan dari 2.330 rombel adalah 3.104 guru, sehingga masih kekurangan jumlah guru sebanyak 137 orang.

Namun demikian, perhitungan tersebut tidak serta merta dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan guru SD di Kota Samarinda, mengingat dalam satu SD Negeri terdapat rombel yang cukup besar dan lebih dari 20 rombel. Untuk itu perhitungan guru agama dan penjas juga memerlukan perhitungan lebih lanjut disesuaikan dengan jumlah rombelnya, karena rumus tersebut merupakan rombel ideal SD Negeri yaitu 6 rombel tiap sekolah.

Untuk menunjang data tersebut, disebarakan kuesioner kepada sekolah-sekolah agar diperoleh data lebih detail lagi. Berdasarkan data hasil kuesioner yang disebar, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.
 Data Hasil Kuesioner SD Negeri di Kota Samarinda

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	PNS	Non PNS	Sertifikasi	Akan Pensiun	Lebih	Kurang
1	SDN 019 Palaran	409	16	16	8	12	1	0	3
2	SDN 005 Samarinda Seberang	450	14	11	7	10	2	0	2
3	SDN 007 Samarinda Seberang	314	12	10	8	4	0	0	0
4	SDN 010 Samarinda Seberang	889	27	24	20	22	2	0	0
5	SDN 023 Palaran	172	7	6	4	5	1	0	0
6	SDN 024 Palaran	225	10	9	5	7	1	0	1
7	SDN 016 Samarinda Seberang	425	14	12	5	10	2	0	2
8	SDN 008 Samarinda Seberang	674	23	18	9	15	2	0	3
9	SDN 002 Samarinda Utara	519	17	13	12	12	3	0	12
10	SDN 001 Samarinda Seberang	513	18	14	11	12	0	0	1
11	SDN 019 Palaran	409	16	16	8	12	1	0	2
12	SDN 004 Samarinda Seberang	378	13	11	5	8	0	0	1
13	SDN 021 Palaran	218	10	8	4	6	1	0	0
14	SDN 002 Samarinda Seberang	330	12	14	3	12	2	0	2
15	SDN 005 Palaran	135	6	7	5	4	1	0	0
16	SDN 016 Palaran	84	6	4	3	3	0	0	3
	Jumlah	6144	221	193	117	154	19	0	32

(Sumber: Hasil Data Penelitian, 2020)

Pada Tabel 1. menunjukkan dari 16 SD Negeri yang mengisi kuesioner, jumlah siswa ada 6.144 dengan jumlah rombel 221. Untuk jumlah guru PNS 193, guru non PNS 117, guru yang sudah tersertifikasi 154, guru yang akan pensiun sampai 2 tahun mendatang sebanyak 19, dan jumlah kekurangan guru sebanyak 32. Dari tabel tersebut juga diketahui jika dari 16 sekolah terdapat 5 sekolah yang kebutuhan gurunya sudah terpenuhi, dan 11 sekolah yang masih kekurangan jumlah guru PNS. Jika ditambahkan antara jumlah kekurangan guru dengan jumlah guru yang akan pensiun dalam 2 tahun mendatang, maka kekurangan guru PNS sebanyak 51 orang.

Sesuai Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal, berikut ini prinsip perhitungan guru pada SD Negeri: 1) murid maksimal berjumlah 32 orang setiap kelas, 2) setiap 32 siswa terdapat 1 orang guru, 3) pada daerah khusus, tiap satuan pendidikan minimal terdapat 4 orang guru kelas, 4) pada daerah non khusus, tiap satuan pendidikan minimal terdapat 6 orang guru kelas, dan 5) tiap satuan Pendidikan memiliki guru agama, guru penjasorkes, dan guru muatan lokal.

b. SMP Negeri di Kota Samarinda

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebanyak 48 sekolah, dengan jumlah rombel sebanyak 842. Data menunjukkan jumlah SMP Negeri yang ada di Kota Samarinda sebanyak 48 dengan jumlah rombel 842 dengan jumlah guru PNS sebanyak 1.040, yang idealnya berjumlah 1.578 guru PNS. Namun pada 48 SMP Negeri tersebut terdapat 301 guru non PNS, yang artinya pada jenjang SMP Negeri di Kota Samarinda masih kekurangan sebanyak 237 guru. Jika dilihat dari seluruh jumlah guru PNS ideal pada SMP Negeri di Kota Samarinda, maka masih kekurangan sebanyak 538 guru PNS.

Pada mapel IPS terdapat kelebihan 8 guru PNS dan jumlah kekurangan guru terbanyak adalah mapel BK yaitu sebanyak 128 guru. Berdasarkan data menunjukkan jika pada mapel agama, PPPKn, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris terdapat kelebihan guru PNS, namun di sisi lain juga terdapat SMP yang kekurangan guru PNS pada mapel tersebut. Sedangkan untuk mapel yang masih kekurangan guru PNS adalah Bahasa Indonesia, BK, penjas, seni, dan prakarya.

Dari 26 SMP Negeri yang mengisi kuesoner, memiliki jumlah siswa 15.873 dengan jumlah rombel 473. Selain itu juga diketahui bahwa terdapat 617 guru PNS dan 201 guru non PNS, jumlah guru yang telah sertifikasi sebanyak 557 orang, dan guru PNS yang akan pensiun sampai 2 tahun mendatang sebanyak 100 orang. Untuk kelebihan jumlah guru PNS sebanyak 15 orang dan kekurangan guru PNS sebanyak 200 orang. Berdasarkan data diketahui jumlah kekurangan guru PNS saat ini adalah sebanyak 538 orang dan sampai 2 tahun kedepan ada lebih dari 100 guru PNS akan pensiun.

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 menjelaskan tentang jumlah guru pada setiap mata pelajaran adalah 1 orang di setiap SMP. Namun, jika jumlah jam mengajar tidak memenuhi kewajiban mengajar, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan berikut: 1) masing-masing guru jumlah tatap muka per minggu tidak lebih dari 40 jam, maka dibulatkan ke bawah, dan 2) masing-masing guru jumlah tatap muka per minggu lebih dari 40 jam, maka dibulatkan ke atas dengan catatan tersendiri. Untuk melakukan perhitungan jumlah guru SMP yang ideal dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{GURU SMP KG} = (\text{MP1} \times \sum \text{K1}) + (\text{MP2} \times \sum \text{K2}) + (\text{MP3} \times \sum \text{K3}) \times 24$$

Keterangan:

KG = kebutuhan guru

JTM = jumlah tatap muka per jenis guru per minggu

MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran tertentu di satu tingkat

$\sum \text{K}$ = jumlah Kelas/rombongan belajar pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu

24 = wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24, 1,2,3 = tingkat 1, 2 dan 3

Pada SMP Negeri terdapat perhitungan kebutuhan guru sesuai dengan mata pelajarannya, berikut ini rumus perhitungannya:

$$G = KG \text{ Hitung Jam Tatap Muka}$$
$$JTM = JR \times JPM$$

Jumlah rombongan belajar (JR)
Jumlah guru tiap mata pelajaran (G)
Kelebihan/Kekurangan Guru

Berikut ini rekap data hasil kuesioner pada tingkan SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda.

Tabel 2.
Data Hasil Kuesioner Kebutuhan Guru PNS pada SD dan SMP Negeri

Jumlah Sampel	Jenjang	Siswa	Rombel	PNS	Non PNS	Sertifikasi	Akan Pensiun	Lebih	Kurang
16	SD	1073	221	193	117	154	19	0	32
26	SMP	15837	473	617	201	557	100	15	200

(Sumber: Hasil Data Penelitian, 2020)

Pada tabel 2 diketahui jika kebutuhan guru PNS pada tingkat SMP lebih besar dibandingkan pada tingkat SD, sebab pada tingkat SMP penghitungan guru PNS berdasarkan jumlah mapel dan rombel sedangkan di tingkat SD perhitungan guru PNS berdasarkan jumlah rombel ditambah jumlah guru agama dan penjas. Hal tersebut terkait juga dengan jumlah jam tatap muka per minggu oleh guru, yang disebut sebagai beban mengajar guru.

Merujuk pada PP Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Guru di Pasal 52 ayat (2) menegaskan bahwa beban mengajar guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Namun pemenuhan beban mengajar tersebut tidak selalu dengan 24 jam pembelajaran tatap muka, tetapi juga dapat diganti dengan tugas tambahan jika guru belum memenuhi 24 jam tatap muka.

2. Data Beban Kerja Guru SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda

Untuk jumlah tatap muka guru SD per minggu antara 30 - 36 jam, dengan rincian 1) guru kelas rendah (kelas 1 - 3) antara 32 jam per minggu, dan 2) guru kelas tinggi (kelas 4 - 6) 36 jam, atau jika dibuat rata-rata adalah 34 jam tatap muka per minggu. Jumlah SD Negeri di Kota Samarinda adalah 163 sekolah dengan jumlah rombel 2.330, maka akan didapat beban mengajar untuk guru kelas adalah sebagai berikut:

$$\text{Beban Mengajar Guru} = 2.330 \text{ rombel} \times 3 \text{ jam}$$

$$\text{Beban Mengajar Guru} = 79.220 \text{ jam tatap muka per minggu}$$

$$\text{Beban Mengajar tiap Guru} = 79.220 : 2.967 = 27 \text{ jam per minggu}$$

Hasil tersebut berarti rata-rata guru kelas SD Negeri di Kota Samarinda memiliki jumlah jam tatap muka per minggu 27 jam dan sudah melebihi dengan tuntutan beban mengajar tatap muka per minggu yaitu 24 jam. Untuk jumlah guru yang ideal agar tidak melebihi 24 jam tata muka per minggu, maka jumlah guru PNS SD yang diperlukan adalah sebanyak 3.300 orang dengan perhitungan:

$$79.220 : 24 = 3.300 \text{ orang guru}$$

Jika perhitungan diasumsikan berdasarkan hasil kuesioner, maka beban kerja seorang guru PNS adalah 37 jam tata muka per minggu dan hasil tersebut jauh melebihi dari beban yang seharusnya yaitu 24 jam per minggu. Jika ditambah dengan jumlah guru non PNS, maka beban mengajarnya menjadi 23 jam per minggu, yang artinya masih kurang dari beban yang seharusnya yaitu 24 jam. Namun demikian, beban kerja guru tidak hanya mengajar tetapi juga pekerjaan atau tugas lainnya yang diakui. Tugas guru yang diakui sebagai beban kerja antara lain: wali kelas, pengurus perpustakaan, dan lain-lain. Selain itu, penambahan

beban kerja guru PNS pada SMP tidak hanya mengajar tatap muka saja tetapi juga termasuk tugas tambahan seperti wakil kepala sekolah, pembina OSIS, pengelola perpustakaan, dan lain-lain.

Perhitungan beban kerja guru berdasarkan pada UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru, Permendiknas No. 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru & Pengawas Satuan Pendidikan, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru & Pengawas oleh Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas. Pada Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008, Pasal 3 ayat (2) bahwa guru harus memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru yang profesional dan memiliki martabat akan menciptakan generasi penerus yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Permasalahan pada pemenuhan beban kerja atau beban mengajar guru yang merupakan tuntutan profesi adalah minimal 24 dan maksimal 40 jam tatap muka setiap minggu. Sementara itu, guru tidak semuanya memiliki beban mengajar 24 jam tiap minggu yang merupakan syarat untuk mendapat sertifikat pendidik agar guru memperoleh tunjangan profesi. Untuk itu perlu dilakukan kajian dan analisis kebutuhan guru di sekolah oleh pemerintah Kota Samarinda, agar distribusi guru tersebar secara merata sesuai dengan kebutuhan.

Pada setiap jenjang pendidikan memiliki perbedaan alokasi waktu, seperti pada jenjang SD dan SMP setiap jam tatap muka memiliki durasi waktu 35 menit.

Beban kerja 24 jam tatap muka tersebut merupakan bagian jam kerja guru PNS yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam (60 menit) /minggu. Dijelaskan pula pada PP6 No. 74 Tahun 2008, Pasal 52 ayat (2) bahwa jam tatap muka merupakan beban kerja guru terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dan dialokasikan dalam 1 minggu yang tercantum dalam dalam struktur kurikulum sekolah.

3. Distribusi Guru SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda

Berikut ini data jumlah guru SD Negeri di Kota Samarinda berdasarkan kecamatan.

Tabel 3.

Jumlah SD Negeri dan Guru di Kota Samarinda Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah SDN	Rombel	Ruang Kelas	Guru
1	Loa Janan	10	153	95	192
2	Palaran	24	245	230	328
3	Samarinda Ilir	9	162	117	205
4	Samarinda Kota	11	168	108	222
5	Samarinda Seberang	13	210	167	256
6	Samarinda Ulu	21	315	238	422
7	Samarinda Utara	25	295	226	350
8	Sambutan	14	162	119	195
9	Sungai Kunjang	20	360	264	472
10	Sungai Pinang	16	260	130	325
Grand Total		163	2330	1694	2967

(Sumber: Hasil Olah Data Penelitian)

Berdasarkan tabel 3 tersebut, SD Negeri terbanyak di Kota Samarinda ada di Kecamatan Samarinda Utara yaitu 25. Hal ini wajar mengingat Kecamatan Samarinda Utara merupakan kecamatan terluas di Kota Samarinda (229,52 km²) dengan jumlah kelurahan ada 8 dan jumlah penduduk 99.838 jiwa. Namun demikian, jumlah rombel terbanyak ada di Kecamatan Sungai Kunjang, yaitu 360 dengan jumlah guru mencapai 472. Kecamatan

Sungai Kunjang memiliki jumlah penduduk 126.795 jiwa yang tersebar pada 7 kelurahan. Data pada tabel 7 dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut, total kebutuhan guru SD berdasarkan kecamatan adalah 3.104 orang, sedangkan guru yang tersedia adalah 2.967, sehingga masih kekurangan guru SD sebanyak 137 orang.

Tabel 4.

Perbandingan antara Jumlah Rombel dan Ruang Kelas tiap Sekolah Berdasarkan Kecamatan

Keterangan	LI	P	SI	SK	SS	SU	ST	S	SKJ	SP	Jumlah
rombel > ruang kelas	8	4	7	8	10	15	13	11	15	16	107
rombel = ruang kelas	1	18	0	3	0	3	10	3	1	0	39
rombel < ruang kelas	1	2	2	0	3	3	2	0	4	0	17
Jumlah	10	24	9	11	13	21	25	14	20	16	163

(Sumber: Hasil Olah Data Penelitian)

Untuk distribusi guru PNS pada SMP Negeri di Kota Samarinda, didasarkan pada mapel yang diajarkan, berikut tabel distribusi guru SMP Negeri di Kota Samarinda.

Tabel 5.

Data Kebutuhan Guru PNS pada SMP Negeri di Kota Samarinda

Keterangan	Agama	PPKn	Indo	Mtk	IPA	IPS	Ing	BK	Penjas	Seni	Prakarya	Kebutuhan
Jumlah	13	-19	-44	-13	-3	24	-4	-111	-21	-35	-33	-246
Rata-rata	0	0	-1	0	0	1	0	-2	0	-1	-1	-5

(Sumbe: Data Hasil Penelitian, 2020)

Berdasarkan tabel 5 diketahui jika guru pada SMP Negeri di Kota Samarinda masih kekurangan sebanyak 246 dan jumlah ini termasuk jumlah guru non PNS, namun pada mapel agama dan IPS terjadi kelebihan jumlah guru. Dari data tabel tersebut juga diketahui jika kebutuhan guru PNS SMP Negeri di Kota Samarinda hampir pada semua mapel dan semua sekolah kekurangan jumlah guru atau masih membutuhkan tambahan guru PNS untuk semua mapel, kecuali SMP Negeri 2 dan 44 tidak membutuhkan tambahan guru.

Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, maka distribusi guru PNS harus merata. Hal tersebut didasarkan pada:

1. Data Kelembagaaan
2. Luas Wilayah, Kondisi Geografis, dan Potensi Daerah
3. Jumlah dan Komposisi guru PNS yang tersedia pada setiap jenjang
4. Jumlah guru PNS yang akan memasuki masa pensiun
5. Rasio antara jumlah penduduk dengan jumlah guru PNS
6. Rasio antara Anggaran Belanja Pegawai dengan Anggaran Belanja secara keseluruhan

Selain itu juga diperlukan data terkait jumlah sekolah dan jumlah rombongan belajar (rombel) pada sekolah negeri. Perubahan kurikulum juga menjadi salah satu pertimbangan dalam distribusi guru, sebab saat ini Kurikulum 2013 berbeda dengan KTS. Pada Kurikulum 2013 jumlah guru yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan pada KTSP karena perubahan jam tatap muka dalam satu minggu, jika KTSP hanya 32 jam, maka pada Kurikulum 2013 ada 38 jam tatap muka di jenjang SMP.

Berdasarkan laporan Indonesia berada pada posisi ideal berdasarkan rasio guru murid SD antar negara dengan rasio 1:17 pada tahun 2018 (Maharrani, 2020). Namun demikian, pola rasio murid-guru terus menurun pada jenjang pendidikan SD turun 22 persen, dan di tingkat SMP menurun 7 persen sejak tahun 1998 hingga 2018 (Maharrani, 2020). Hal tersebut menunjukkan jika distribusi guru di Indonesia merata, dan berlaku juga untuk Kota Samarinda karena merupakan data rata-rata Indonesia. Untuk itu diperlukan regulasi

penempatan dan distribusi guru oleh Pemerintah Daerah karena dapat dijadikan landasan kebijakan kepala dinas pendidikan untuk melakukan penataan distribusi guru.

4. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Guru SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda

Kebutuhan guru PNS dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan masa pensiun guru yang tidak diiringi dengan jumlah pengangkatan guru PNS yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan data jumlah rombel dan guru PNS baik tingkat SD maupun SMP Negeri di Kota Samarinda, maka dapat diproyeksi kebutuhan guru dengan menggunakan rumus berikut.

Untuk menghitung jumlah pengurangan guru adalah.

$$KG = KGT - (GA - GP/GK/GS)$$

Keterangan:

KG : kekurangan guru

KGT : kebutuhan guru total

GA : guru yang ada

GP : guru yang akan pensiun

GK : guru yang karena sesuatu alasan akan keluar

GS : guru yang karena belum fully qualified akan meneruskan pelajaran.

Sesuai data pada hasil kuesioner yang telah diisi oleh beberapa sekolah, maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 6.
Data Hasil Kuesioner Kebutuhan Guru PNS SD dan SMP

Sampel	Jenjang	Siswa	Rombel	PNS	Non PNS	Sertifikasi	Akan Pensiun	Lebih	Kurang
16	SD	1073	221	193	117	154	19	0	32
26	SMP	15837	473	617	201	557	100	15	200

(Sumber: Data Hasil Penelitian, 2020)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui jika proyeksi kebutuhan guru PNS pada 16 SD Negeri di Kota Samarinda dengan jumlah rombel 221 adalah sebanyak 206 orang. Pada saat ini jumlah kekurangan guru PNS pada 16 SD Negeri di Kota Samarinda adalah 32 orang dan jumlah guru PNS yang tersedia saat ini sebanyak 193 orang, maka jumlah kebutuhan guru PNS pada 16 SD Negeri adalah 45 orang. Hasil tersebut diperoleh dari $(206 - 193) + 32 = 45$ orang guru PNS.

Demikian juga proyeksi kebutuhan guru PNS pada SMP Negeri di Kota Samarinda menggunakan formula kebutuhan guru suatu jenis sekolah atau tingkat sekolah tertentu secara umum. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui jika proyeksi kebutuhan guru PNS pada 26 SMP Negeri di Kota Samarinda dengan jumlah rombel 473 adalah sebanyak 717 orang. Pada saat ini jumlah kekurangan guru PNS pada 26 SMP Negeri di Kota Samarinda adalah 200 orang dan jumlah guru PNS yang tersedia saat ini sebanyak 617 orang, maka jumlah kebutuhan guru PNS pada 26 SMP Negeri adalah 300 orang. Hasil tersebut diperoleh dari $(717 - 617) + 200 = 300$ orang guru PNS.

Pentingnya proyeksi kebutuhan guru pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda adalah untuk:

1. Mengurangi jumlah guru yang tidak sesuai antara ijazah atau kompetensinya dengan mapel yang diajarkan
2. Pemerataan guru
3. Pemenuhan kebutuhan guru pada mapel tertentu, seperti guru BK yang masih banyak kekurangan

Untuk itu penting dilakukan proyeksi kebutuhan guru, kajian tentang proyeksi kebutuhan guru perlu memperhatikan kondisi eksisting, kondisi ideal dan kondisi proyeksi

kebutuhan jumlah guru PNS pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda. Faktor diterminan merupakan elemen-elemen yang mempengaruhi perhitungan proyeksi kebutuhan guru. Faktor diterminan tersebut meliputi: (1) pertumbuhan jumlah murid (siswa), (2) murid yang pindah dan pindahan, (3) murid yang putus sekolah, (4) pertumbuhan jumlah kebutuhan guru, dan (5) guru yang pensiun. Sedangkan perhitungan kebutuhan jumlah guru pada suatu sekolah memerlukan data berikut: jumlah pertumbuhan sekolah, jumlah tatap muka setiap minggu pada semua mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu, beban mengajar guru setiap minggu, jumlah murid per kelas yang dianggap efektif untuk menerima suatu mata pelajaran, jumlah guru yang dimiliki sekolah, jumlah guru yang akan pensiun atau berhenti atau karena suatu hal akan meninggalkan jabatan guru, dan jenis sekolah dan jenjang sekolah yang memerlukan guru.

Proyeksi kebutuhan guru pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda perlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan guru dimasa mendatang. Permasalahan kebutuhan guru akan dapat diatasi jika proyeksi dilakukan jauh hari, mengingat pada tahun 2022 sebanyak 85.650 guru di Indonesia akan pensiun pada 2022 (Maharrani, 2020). Kebijakan pengangkatan guru SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru, agar tidak terjadi kegagalan pemenuhan kebutuhan guru (Ilfiyah,A., 2015).

5. Sertifikasi Guru SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda

Dasar pelaksanaan sertifikasi adalah UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 8 yaitu: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Landasan hukum lainnya adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

Berikut ini data guru SD dan SMP di Kota Samarinda yang sudah dan belum tersertifikasi:

Tabel 7.
Data Guru SD dan SMP Negeri yang Sudah dan Belum Sertifikasi

No	Jenjang	Sudah	Belum	Jumlah
1	SD	1.424	160	1.584
2	SMP	914	129	1.043
	Jumlah	2.338	289	2.627

(Sumber: Dinas Pendidikan Samarinda, 2020)

Berdasarkan tabel 7 diketahui jika jumlah total guru PNS pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda sebanyak 2.338 orang dan yang belum sebanyak 289 orang. Ha ini berarti tinggal 12% guru PNS pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda yang belum tersertifikasi. Sesuai dengan Pasal 39 ayat 2, UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, guru adalah tenaga profesional yang artinya sudah tersertifikasi.

6. Analisis SWOT Kajian Pengelolaan Guru SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda

Guna menganalisis strategi pengelolaan guru SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda, maka perlu dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Adapun analisis ini guna melihat bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengelolaan guru SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda, yang kemudian dapat diperoleh strategi pengelolaannya. Untuk kekuatan (*strength*) dari pengelolaan guru ini adalah: (1) Terdapat kelebihan guru di beberapa sekolah yang bisa didistribusikan ke

sekolah lain yang membutuhkan. (2) Usia guru PNS masih didominasi guru – guru yang masih usia produktif (belum mendekati masa pension) dan (3) Sebagian guru telah tersertifikasi.

Sedangkan kelemahan (*weakness*) yang ada terdiri dari, (1) Sebagian guru yang sudah memasuki masa pensiun dalam kurun waktu dekat, (2) Sebagian besar guru belum tersertifikasi (terutama guru SD), (3) Masih banyak guru yang mengajar lebih dari 24 jam /minggu, (4) Banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas, (5) Banyak sekolah SD kekurangan guru Agama dan Penjas, (6) Sebagian besar sekolah – sekolah SMP kekurangan beberapa guru mapel dan BK, dan (7) Kurang meratanya ketersediaan guru di setiap sekolah. Banyaknya kelemahan yang ada menjadi suatu pertimbangan sendiri dalam pengelolaan guru SD dan SMP ini.

Jika dilihat dari peluang (*opportunities*) yang ada dalam pengelolaan guru SD dan SMP ini diantaranya: (1) Dibukanya penerimaan guru CPNS dan PPPK, (2) diperbolehkannya penambahan guru Non PNS, (3) Adanya pendanaan peningkatan kompetensi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Walaupun terdapat beberapa peluang dalam pengelolaan guru ini, tetapi juga terdapat beberapa ancaman (*Threat*) yang harus diperhatikan diantaranya: (1) Tingginya angka kelahiran di Kota Samarinda dan (2) tingginya angka migrasi penduduk ke Kota Samarinda.

Sesuai hasil analisis faktor internal dan eksternal yang ada dalam SWOT maka dapat dibuat suatu analisis strategi pengelolaan guru PNS pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan rencana dan kebijakan yang bisa laksanakan terkait pengelolaan guru SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda. Perumusan strategi pengelolaan tersebut dibuat dalam sebuah matrik analisis SWOT yang dapat dilihat pada tabel berikut:

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Kekuatan (S):</p> <p>a. Terdapat kelebihan guru di beberapa sekolah yang bisa didistribusikan ke sekolah lain yang membutuhkan.</p> <p>b. Usia guru PNS masih didominasi guru – guru yang masih usia produktif (belum mendekati masa pensiun)</p> <p>b. Sebagian guru telah tersertifikasi</p>	<p>Kelemahan (W):</p> <p>a. Sebagian guru yang sudah memasuki masa pensiun dalam kurun waktu dekat.</p> <p>b. Sebagian besar guru belum tersertifikasi (terutama guru SD)</p> <p>c. Masih banyak guru yang mengajar lebih dari 24 jam /minggu</p> <p>d. Banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas</p> <p>e. Banyak sekolah SD kekurangan guru Agama dan Penjas</p> <p>f. Sebagian besar sekolah – sekolah SMP kekurangan beberapa guru mapel dan BK</p> <p>g. Kurang meratanya ketersediaan guru di setiap sekolah.</p>
<p>Peluang (O):</p> <p>a. Dibukanya penerimaan guru CPNS dan PPPK</p> <p>b. Diperbolehkannya penambahan guru Non PNS</p> <p>c. Adanya pendanaan peningkatan kompetensi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG)</p>	<p>Strategi SO:</p> <p>a. Pendistribusian kelebihan guru ke sekolah – sekolah yang membutuhkan.</p> <p>b. Pengoptimalan guru PNS / tersertifikasi dengan minimal mengajar perminggu 24 jam.</p>	<p>Strategi WO:</p> <p>a. Pengusulan program PPG bagi guru – guru yang belum tersertifikasi secara berkala guna peningkatan kompetensi guru baik SD maupun SMP.</p> <p>b. Pengusulan formasi guru CPNS dan PPPK sesuai dengan kebutuhan/ kekurangan guru secara multi tahun.</p> <p>c. Perekrutan tenaga guru Non PNS sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak untuk dipenuhi.</p>

Ancaman (T):	Strategi ST:	Strategi WT:
a. Tingginya angka kelahiran di Kota Samarinda b. Tingginya angka migrasi penduduk ke Kota Samarinda	a. Mempertahankan guru yang ada dan memperkecil izin mutasi guru ke kota/kabupaten lain. b. Memberikan izin mutasi guru masuk ke Kota Samarinda (jika sesuai dengan kebutuhan).	a. Penambahan ruang kelas di sekolah – sekolah yang rombelnya lebih banyak dari pada ruang kelas. b. Pemerataan penempatan guru yang ada dan penerimaan guru yang akan datang melalui CPNS maupun PPPK.

Gambar 2.
Analisis SWOT Kajian Kebutuhan Guru SD dan SMP Negeri
(Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian, 2020)

7. Kebijakan Pengelolaan Guru SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda

Berdasarkan data penelitian menunjukkan jika jumlah guru pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda masih belum mencukupi kebutuhan atau masih kurang. Selain itu, guru PNS yang akan pensiun sampai 2 tahun mendatang cukup banyak, baik guru SD maupun SMP. Untuk itu perlu kebijakan terkait pengangkatan guru PNS SD dan SMP di Kota Samarinda dan merujuk pada data terkait jumlah guru non PNS, maka diperlukan juga kebijakan untuk mengutamakan guru yang non PNS agar mendapat prioritas untuk diangkat menjadi PNS.

Kebijakan Pengelolaan Guru SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda memerlukan regulasi distribusi pemerataan guru sebagai dasar hukum bagi pemerintah Kota Samarinda dalam mengatur penempatan dan mutasi guru PNS. Hampir di seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki Peraturan Daerah dan atau sekurang-kurangnya Peraturan Bupati/Walikota yang memberi kekuatan hukum bagi kepala dinas untuk menempatkan guru dan memutasi guru (Yani, 2010). Penentuan kebutuhan jumlah guru PNS SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda perlu ditinjau untuk melihat kecenderungan yang ada sehingga dapat dibuat kebijakan terkait distribusi guru PNS sesuai dengan jumlah murid atau jumlah kelas, dan alokasi waktu tata muka, serta jumlah jam mengajar. Hal ini perlu dilakukan agar sesuai dengan keadaan aktual yang ada di lapangan.

Sedangkan kebutuhan dan distribusi guru bidang studi dihitung sesuai dengan jumlah jam belajar setiap mata pelajaran sesuai Kurikulum 2013 dan kewajiban guru mengajar setiap minggunya yaitu minimal 24 jam seminggu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru selain itu juga disesuaikan dengan jumlah kelas yang ada. Pendekatan yang dapat dipilih dalam menentukan kebutuhan dan distribusi guru adalah dengan mengkaji alokasi jumlah jam mengajar guru dalam melaksanakan kewajiban belajar mengajar yaitu 24 jam per minggu. Jumlah kebutuhan guru penting diketahui oleh pemerintah Kota Samarinda, terlebih lagi dengan adanya kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui kewajiban jumlah jam mengajar sesuai dengan spesialisasi mata pelajaran yang harus dilaksanakan tiap minggunya.

Kebijakan pengelolaan dan pemenuhan guru PNS pada SD dan SMP di Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Ada empat faktor yang paling banyak berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan dan distribusi guru yaitu:

1. Regulasi penempatan dan distribusi guru dalam bentuk payung hukum yang kuat
Regulasi penempatan dan distribusi guru merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur penempatan dan mutasi guru.

2. Sistem data informasi kependidikan
Perlunya sinkronisasi data antara Dinas Pendidikan, Bapelitbangda, dan Biro Pusat Statistik (BPS)
3. Adanya pengawasan dan penegakan hukum
Perjanjian dan sanksi bagi guru yang melanggar peraturan saat pengangkatan guru PNS
4. Kekuatan permainan elit politik lokal yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan
Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan tersebut, maka rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda meliputi:
 1. Memberikan pengangkatan bagi guru SD dan SMP di wilayah Kota Samarinda dengan komposisi jumlah sesuai dengan hasil penelitian pada bagian kebutuhan guru SD dan SMP.
 2. Mengangkat guru yang linier ijazahnya berdasarkan kebutuhan guru bidang studi yang diperlukan.
 3. Guru mata pelajaran yang berlebih di sekolah harap segera dipindahkan ke sekolah lain yang memerlukannya di wilayah Samarinda berdasarkan hasil kekurangan guru dan berdasarkan masa guru yang akan pensiun dalam 1 sampai 2 tahun ke depan.
 4. Memberikan peluang bagi guru yang belum bersertifikat pendidik untuk mengikuti PPG dalam jabatan dibiayai oleh pemerintah Kota Samarinda
 5. Mengadakan pemantauan kompetensi pedagogis guru secara periodik melalui penelitian kompetensi praktik pembelajaran.

KESIMPULAN

1. Jumlah guru PNS pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda masih belum mencukupi kebutuhan.
2. Jumlah guru PNS dan non PNS pada SD dan SMP di Kota Samarinda sudah cukup banyak yang tersertifikasi, artinya dari segi kompetensi guru sudah sesuai
3. Hasil proyeksi menunjukkan jika sampai 2 tahun ke depan banyak guru PNS yang akan pensiun, sehingga kebutuhan akan jumlah guru PNS pada SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian Kajian Pengelolaan Guru SD dan SMP Negeri di Kota Samarinda (Perencanaan Kebutuhan, Ketersediaan, Distribusi, Kompetensi, dan Sertifikasi) ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Behrstock, Ellen, M. C. (2010). *Ensuring the Equitable Distribution of Teachers: Strategies for School, District, and State Leaders* (1st ed.). National Comprehensive Center for Teacher. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED520725.pdf>
- Borg, W.R and Gall, M. . (2003). *Educational Research: An Introduction* (4th ed.). Longman Inc.
- BPS. (2020). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. <https://samarindakota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/26/101/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif* (61st ed.). Pustaka.
- Hasan, A. (2003). *Meningkatkan Profesionalisme Guru*. Diknas.
- Ilfiyah,A., et. a. (2015). *Kegagalan Pemerataan Guru Evaluasi SKB 5 Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS di Indonesia*. https://issuu.com/representasiefektif/docs/icw_kegagalan_pemerataan_guru_
- Isma, F. M. A. N. (2017). Analisis Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Guru SMA Di Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan*, 5(4), 253–261. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/9387/7375>
- Koswara. (2016). Kompetensi dan kinerja guru berdasarkan sertifikasi profesi. *JURNAL PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN*, 1(1), 61–71. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3269-6145-2-PB.pdf>
- Maharrani, A. (2020). *Rasio murid-guru cukup, sebaran masih kurang*. Lokadata.Id. <https://lokadata.id/artikel/rasio-murid-guru-cukup-sebaran-masih-kurang>
- Matin. (2013). *Perencanaan pendidikan : perspektif proses dan teknik dalam penyusunan rencana pendidikan* (1st ed.). Rajawali Press.
- Peske, Heather G.; Haycock, K. (2006). *Teaching Inequality: How Poor and Minority Students Are Shortchanged on Teacher Quality: A Report and Recommendations by the Education Trust*. <https://edtrust.org/wp-content/uploads/2013/10/TQReportJune2006.pdf>
- Roestiyah NK. (2001). *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan* (4th ed.). Bina Aksara.
- Rosemarie. (2009). Konsep Administrasi Pendidikan. *Majalah Ilmiah Maranatha*, 16(2), 74–83. <https://repository.maranatha.edu/611/>
- Sappaille, B. I. (2006, September). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *BNSP*, 51–55. [http://www.bsnp-indonesia.org/wp-content/uploads/buletin/Edisi 03.pdf](http://www.bsnp-indonesia.org/wp-content/uploads/buletin/Edisi%2003.pdf)
- Sidqi, M., Suharyanto, S., Astuti, R. Y., & Ardarini, F. (2019). ANALISIS KESESUAIAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU TERHADAP PEMANFAATAN RUANG LAUT EKSISTING SEKTOR WISATA BAHARI DI PULAU KECIL TERLUAR Studi Kasus di Pulau Maratua, Kabupaten Berau. *Seminar Nasional Geomatika*, 3, 957. <https://doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.1062>
- Sunandar. (2006). Analisis Perencanaan Kebutuhan Guru. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 1–13.
- Sunuyeko, Nurcholis. Lani, Ahmad. Wahyuni, L. (2016). Analisis Kebutuhan Guru dalam Pengimplementasian Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. *Jurnal Sekolah Dasar*, 25(2), 18–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um009v25i12016p018>
- Usman, M. U. (2002). *Menjadi Guru profesional*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Yusuf, M. (2018). *Pengantar Ilmu Pendidikan* (D. Ilham (ed.); 1st ed.). Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo. <https://core.ac.uk/download/pdf/198238855.pdf>
- Permendikbud No.15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah

Petunjuk Teknis Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/x/PB/20rr, Nomor SPB/03/M.PAN-RB / rO l2OLr, Nomor 48 Tahun 20il, Nomor 158/PMK.O | /20rr, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil